



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI RIAU**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**PEKANBARU**

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 249, PEKANBARU 28116; TELEPON (0761) 22847; FAKSIMILI (0761) 23117; SUREL :  
KPPNPEKANBARU@GMAIL.COM; SITUS : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEKANBARU

Nomor : S-875/KPN.0401/2022 25 Juli 2022  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Kebijakan Pengaturan Rekonsiliasi Semester I Tahun 2022 Menggunakan Aplikasi MONSAKTI

Yth. KPA Satker Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru

Sehubungan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-29/PB/PB.6/2022 tanggal 12 Juli dan mempertimbangkan penggunaan Aplikasi MONSAKTI yang sedang berjalan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan User untuk akses ke Aplikasi MONSAKTI pada KL diatur sebagai berikut:
  - a. Bagi pengguna di tingkat satker yang sudah memiliki user SAKTI wajib login sesuai role masing-masing modul pada tombol "Gunakan Akun SAKTI", selanjutnya isikan user dan password serta kode captcha.
  - b. Bagi pengguna di tingkat atas (UAPPA-W, UAPPA E1, UAPA) dapat menggunakan user OMSPAN.
  - c. Dalam hal pengguna di tingkat atas belum memiliki user OMSPAN dan user SAKTI, agar mengajukan permintaan user SAKTI level atas tersebut melalui [hai.kemenkeu.go.id](http://hai.kemenkeu.go.id).
2. Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) dalam rekonsiliasi Semester I Tahun 2022 (bulan Juni 2022), tidak memerlukan tutup buku Modul GLP pada Aplikasi SAKTI. Setelah Satker menyelesaikan rekonsiliasi, dapat melanjutkan pemrosesan transaksi untuk penyusunan LK Semester I 2022 dan melakukan tutup buku sementara pada Modul GLP.
3. SHR diterbitkan secara otomatis oleh sistem apabila tidak terdapat TDK Rupiah dan TDK CoA. Dalam hal terdapat TDK Rupiah dan TDK CoA, satker wajib memperbaiki di Aplikasi SAKTI dan selanjutnya mengecek kembali rekonsiliasi pada MONSAKTI (data terupdate H+1 setelah tanggal perbaikan).
4. Dalam hal terdapat TDK Rupiah dan TDK CoA yang disebabkan karena:
  - a. Data Setoran/Belanja Belum Masuk ke SPAN/SiAP
  - b. Data Koreksi Dibukukan Berbeda Periode antara Satker dengan KPPN
  - c. Data Jurnal Balik pada SAKTI Tidak Sesuai (Satker salah melakukan hapus pencatatan)
  - d. Data Setoran Tidak Diakui Satker dengan Surat Pernyataan Tidak Mengakui (satker diminta melakukan upload surat pernyataan KPA sebagaimana lampiran VI S-29/PB/PB.6/2022 sebagai attachment)
  - e. Data Estimasi Pendapatan (PNBP) SAKTI sudah benar sesuai dokumen sumber
  - f. Data Belanja selisih karena perbedaan pembulatan SP2D Valas SAKTI dengan SPAN

Satker dapat mengajukan permintaan persetujuan rekonsiliasi ke KPPN melalui fitur “Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi” pada laman Aplikasi MONSAKTI.

5. Permintaan persetujuan rekon yang disebabkan karena satker tidak mengakui setoran penerimaan negara sebagaimana angka 4 huruf d, satker melampirkan surat pernyataan atas perbedaan data rekonsiliasi pada saat memilih alasan “data setoran tidak diakui satker dengan surat pernyataan tidak mengakui”.
6. Pada prinsipnya rekonsiliasi atas data setoran menggunakan tanggal buku di MPN, sehingga apabila terdapat perbedaan tanggal buku yang mempengaruhi adanya TDK rupiah pada bulan Juni 2022, satker agar tetap memperbaiki data tersebut sehingga TDK rupiah dapat diselesaikan. Sebagai ilustrasi, apabila terdapat setoran yang dicatat oleh SAKTI menggunakan tanggal 30 Juni 2022 (tanggal bayar/setor) sedangkan SPAN mencatat pada buku menjadi tanggal 1 Juli 2022 (tanggal buku), satker diminta untuk menyesuaikan tanggal buku menjadi tanggal 1 Juli 2022. Sementara itu, terhadap perbedaan tanggal buku dalam periode yang tidak mempengaruhi penerbitan SHR yang menyebabkan TDK Detil, satker dapat memperbaiki pada periode mendatang.
7. Terhadap proses rekonsiliasi yang sudah selesai, satker dapat mengunduh SHR pada kolom aksi.
8. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan Perpajakan dan Bea Cukai tahun 2022 pada satker KPP dan KPPBC dikecualikan dari proses rekonsiliasi sehingga nilai yang disajikan pada Estimasi Pendapatan hanya berasal dari PNBPN.
9. Rekonsiliasi dalam rangka menfukung penyusunan LK Semester I tahun 2022 agar dapat dilaksanakan secara optimal meskipun kebijakan sanksi ditiadakan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plh Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik  
Chitra Hari Saptagraha

